

BAB III

KESADARAN ELIT UZBEKISTAN TERHADAP AMBISI NEOIMPERIALIS

AMERIKA SERIKAT

Pada bab III ini, akan dibahas mengenai bagaimana kesadaran elit Uzbekistan menjadi faktor internal yang mempengaruhi kegagalan Amerika Serikat dalam melancarkan ambisi neoimperialismenya di Uzbekistan.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya bahwa keretakan hubungan antara Amerika Serikat dan Uzbekistan bermula sejak diberlakukannya pengurangan atas bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Uzbekistan, yang berlanjut pada pernyataan Uzbekistan pada tahun 2005 mengenai waktu bagi Amerika Serikat untuk menutup pangkalan militernya akibat berbagai bentuk kritikan keras yang diterima elit Uzbekistan mengenai pelaksanaan pemerintahan di negaranya.

Bab ini akan berfokus pada peristiwa Andijan Massacre, yang sebagaimana telah diungkapkan secara singkat pada bab sebelumnya, merupakan momentum penting dimana setelahnya Uzbekistan benar-benar memutuskan hubungan dengan waktu 180 hari yang diberikan untuk Amerika Serikat mengosongkan pangkalan militernya di Karshi Khanabad. Selanjutnya akan menguraikan bagaimana Amerika

Serikat mengalami kegagalan di Uzbekistan, khususnya pada pasca peristiwa Andijan Massacre tersebut.

A. Peristiwa Andijan Massacre

Peristiwa yang cukup menggemparkan dunia, Andijan Massacre; menjadi salah satu faktor utama atas timbulnya kesadaran Uzbekistan terhadap adanya kecenderungan ambisi neoimperialis di dalam hubungan kerja sama yang terjalin dengan pihak Amerika Serikat. Mengapa dikatakan demikian, sebab meskipun hubungan keduanya memang telah mulai mengalami keretakan sebelumnya, namun secara spesifik, pada akhirnya pemutusan hubungan kerja sama adalah tepat pasca peristiwa Andijan Massacre tersebut.

Sesuai dengan jurnal Human Rights Watch (2005), peristiwa yang dimulai pada tanggal 13 Mei 2005 itu terjadi tepatnya di kota Andijan, bagian timur Uzbekistan. Pada dini hari itu, gedung pemerintahan diserang oleh orang-orang bersenjata, membunuh para pejabat pemerintahan dan merusak penjara kota kemudian mengambil alih gedung pemerintahan tersebut—yang disebut juga *hokimiat*, dan membebaskan sandera. Menjelang subuh, mereka mulai mempersiapkan diri untuk melakukan demonstrasi besar di Bobur Square, atau di depan *hokimiat*, dan memobilisasi orang-orang untuk sebanyak-banyaknya hadir agar dapat memberikan tuntutan terhadap presiden Islam Karimov terkait pemberian penjelasan atas penyanderaan yang dilakukan terhadap sebanyak 23 orang pengusaha terkenal yang diklaim pemerintah sebagai para aktivis

ekstrimisme Islam, keluhan tentang kemiskinan, dan penindasan pemerintah atas masyarakat. Hingga pada pukul 11.00 siang, para demonstran yang berkumpul semakin bertambah, hingga kiranya menjadi ribuan orang. Mereka dikatakan datang atas keinginan dan kehendak sendiri, untuk dapat menjadi bagian dari demonstrasi pada hari itu.

Selanjutnya, menanggapi hal tersebut pemerintah meresponnya dengan menurunkan pasukan militer yang serta merta menutup alun-alun kota dan mulai menembak para demonstran tanpa peringatan serta tanpa pandang bulu. Para demonstran saat itu sontak berusaha melarikan diri, namun serangan pasukan militer terus berlanjut. Pasukan militer elit Uzbekistan saat itu menggunakan senjata AK-47 (Avtomat Kalashinkova 1947) yang merupakan senjata khas blok timur buatan Rusia, sejenis senapan mesin berat yang digunakan untuk menyerang masyarakat sipil. Menurut Daniil Kislov, seorang pengamat Asia asal Moscow, Rusia, Karimov yang saat itu dihadapkan oleh kasus ekstrimisme di negaranya, tidak mentolerir akan adanya perlawanan terhadap pemerintah²⁸.

Kelompok-kelompok pembela Hak Asasi Manusia memberikan kritik keras atas tindakan elit Uzbekistan yang sangat tidak menghargai hak-hak asasi rakyatnya. Uzbekistan benar-benar mendapatkan tekanan besar atas tindakannya tersebut. Peristiwa Andijan dinilai sebagai bukti dari segala sifat represif pemerintah Uzbekistan sebab menggunakan segala bentuk kekerasan yang

²⁸Mansur Mirovalev (2015, Mei 2015). Diakses pada Maret 28, 2017, dari Aljazeera: <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/05/150511123115026.html>

berlebihan untuk menghancurkan para demonstran yang merupakan masyarakat sipil dalam jumlah yang tidak sedikit, yakni sebanyak ± 700 orang termasuk wanita dan anak-anak. Ini merupakan narasi yang berkembang di pihak barat, sebagaimana juga diperkuat oleh laporan dari para jurnalis asing yang hadir langsung di tempat kejadian (Daly, 2016).

Sementara di sisi lain, elit Uzbekistan juga sama kuatnya menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi adalah atas dorongan kelompok militan Islam yang diklaim memulai kerusuhan. Terkait hal tersebut disebutkan bahwa para militan menodongkan senjata yang diperoleh sebelumnya dari upaya mereka menyerang kantor polisi sekaligus membebaskan sandera saat itu. Maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebutuhan atas penolakan mereka terhadap upaya pemerintah untuk menegosiasikan solusi damai. Pemerintah meyakini bahwa tanggung jawab yang telah dilakukan, meskipun banyak mengakibatkan kerugian, namun sudah sesuai dan proporsional sebab didorong oleh pilihan pada kondisi yang mendesak (Daly, 2016). Disini terlihat kekuatan rejim elit Uzbekistan saat itu, yang dengan terang-terangan menegaskan kekuasaannya terhadap masyarakat dan menolak adanya pemberontakan.

Selanjutnya terkait jumlah korban, sesuai dengan klaim pemerintah Uzbekistan dilaporkan bahwa jumlah korban adalah sebanyak 187 jiwa, angka yang sangat jauh berbeda dengan apa yang disebutkan oleh kelompok-kelompok

pembela hak asasi manusia. Lagi-lagi, terkait jumlah korban elit Uzbekistan menegaskan bahwa ekstrimisme Islam adalah dalangnya.

Dalam perkembangannya, pemerintah memang sangat membatasi berbagai pemberitaan terkait peristiwa tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat tidak berani pula untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan setiap kali mereka dimintai penjelasan detil mengenai tragedi Andijan Massacre yang mereka alami. Peristiwa ini mengalami isolasi cukup ketat dari pemerintah Uzbekistan, sehingga tidak banyak yang mengetahui mengenai bagaimana detil sebenarnya kejadian tersebut. Hal tersebut disebabkan karena bahkan masyarakat yang mengetahui pun mayoritas menolak dengan tegas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai peristiwa memprihatinkan tersebut.

Lebih lanjut, menurut Human Rights Watch (2005) bentuk isolasi pemerintah atas peristiwa ini sangatlah ketat, bahwa sangat sedikit yang diketahui mengenai bagaimana detil terjadinya Andijan Massacre tersebut, kemudian apa yang terjadi setelahnya terhadap para demonstran baik yang terbunuh maupun mereka yang selamat. Human Rights Watch mencatat bahwa pihak kepolisian Andijan, atas kendali yang serius dari para elit pemerintahan, melakukan pemaksaan berupa pemukulan serta penyiksaan terhadap masyarakat yang terlibat agar kemudian dapat memberikan pengakuan palsu atau setidaknya lebih memilih diam dan tidak lagi membahas mengenai terjadinya peristiwa tersebut.

Sikap elit Uzbekistan terhadap peristiwa ini otomatis menuai berbagai macam respon dari dunia internasional, terutama berupa kritik dan tekanan. Salah satu pihak yang memberikan kritik tekanan serius adalah Amerika Serikat, di tengah perjalanan hubungan kerja sama yang terjalin dengan Uzbekistan. Pengaruh Amerika Serikat di mata dunia yang begitu kuat, tentu saja berefek pada terbentuknya opini publik mayoritas di dunia internasional terkait sikap yang diambil oleh elit Uzbekistan tersebut. Walaupun pada dasarnya, tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat merupakan bentuk peringatan atas dasar kerja sama yang terjalin diantara keduanya, bahwa Uzbekistan pada tahun ketiga sejak disepakatinya perjanjian kerjasama yang salah satunya secara tegas menyebutkan tentang Hak Asasi Manusia hampir dalam setiap sub perjanjiannya, ternyata juga tidak dapat menjamin bahwa masyarakatnya mendapatkan jaminan atas penghormatan hak asasi manusia yang dimiliki.

Terlepas dari kepentingan rezim elit Uzbekistan yang berkuasa pada saat itu terkait sikap yang diambil atas peristiwa Andijan Massacre, bagaimanapun juga dapat dikatakan juga merupakan bentuk perlindungan atas kedaulatan negara dari adanya ancaman kelompok ekstrimisme Islam yang di saat-saat itu menjadi prioritas utama politik Uzbekistan dan negara-negara di sekitar kawasan untuk menjamin keamanan negaranya atas hal-hal terkait masalah tersebut. Lebih lanjut, jika ditengok ke belakang juga sesungguhnya hal yang menjadi sorotan di dalam perjanjian strategis yang disepakati oleh Amerika Serikat dan Uzbekistan,

termasuk di dalamnya mengenai perlawanan serta pencegahan atas hal-hal terkait terorisme, ekstrimisme dan sejenisnya yang dapat mengancam keamanan negara.

Kesadaran pihak elit Uzbekistan, bahwa tekanan yang diberikan oleh Amerika tidak hanya baru dirasakannya terkait peristiwa Andijan Massacre tersebut, melainkan juga terkait pelaksanaan demokrasi di Uzbekistan di saat-saat sebelumnya, membuat pihak elit Uzbekistan pada saat itu mengambil keputusan untuk lebih baik mengakhiri hubungan kerja sama yang terjalin dengan Amerika Serikat. Bahwa di tengah hubungan yang terjalin dengan Amerika Serikat, terutama di saat kemudian elit Uzbekistan secara subjektif memerlukan dukungan khusus dari pihak-pihak terdekat, terutama Amerika Serikat tentunya sebagai partner kerja sama strategisnya terkait peristiwa besar yang baru terjadi, ternyata justru kritik dan tekanan serius yang mereka terima.

B. Kegagalan Amerika Serikat

Setelah mendalami mengenai peristiwa Andijan Massacre, maka selanjutnya yang perlu diketahui secara signifikan adalah bagaimana Amerika Serikat kemudian gagal melancarkan manifestasi ambisi neoimperialismenya di Uzbekistan, khususnya pada saat setelah terjadinya peristiwa yang menjadi faktor utama pendorong kesadaran elit Uzbekistan terhadap hal tersebut.

Sikap Uzbekistan yang dengan tegas merespon adanya tekanan dari Amerika Serikat yang semakin waktu kian meningkat, tersebut tercermin dari fakta bahwa pada akhirnya setelah sebelumnya melakukan pembatasan atas operasi militer

Amerika Serikat di negaranya, kemudian secara resmi Uzbekistan memberikan pernyataan resmi mengenai pemutusan hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat melalui waktu selama 180 hari yang diberikan untuk mengosongkan pangkalan militernya di Karshi Khanabad. Lebih jelasnya, pejabat resmi departemen dalam negeri Uzbekistan menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan melanjutkan kepentingan dalam hal “*promoting democracy and human rights*” di negaranya, melainkan secara patuh akan mengosongkan Karshi Khanabad (K-2) Airbase tanpa adanya diskusi lebih lanjut (Washington File Staff Writer, 2005).

Walaupun lingkup kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Uzbekistan memang tidak hanya terkait keamanan dan militer, sebagaimana diketahui sesuai dengan dokumen perjanjian yang telah disepakati keduanya, namun bahwa motivasi awal terjalinnya kerja sama ini adalah terkait penjaminan stabilisasi di wilayah perbatasan Afghanistan, sehingga bagi Amerika Serikat, pangkalan militer adalah hal yang sangat penting dan tentu saja menguntungkan bagi pihaknya. Maka dengan kata lain, adanya pernyataan pemberian waktu 180 hari untuk penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Karshi Khanabad, sekali lagi tidak ada keraguan terhadapnya, merupakan bentuk pemutusan hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Uzbekistan.

Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai poin-poin perjanjian dalam kesepakatan resmi *Declaration on the*

Strategic Partnership and Cooperation Framework, aspek-aspek kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dimana Amerika Serikat gagal dalam melaksanakannya di Uzbekistan melalui kerja sama tersebut, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a) Aspek Politik

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan khususnya pada aspek ini adalah melalui bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk terlaksananya pemerintahan di Uzbekistan dalam bentuk finansial.

Pada tahun fiskal 2002, bantuan yang diterima oleh Uzbekistan dari pihak Amerika Serikat diestimasikan secara total mencapai \$297.84 Juta²⁹. Secara resmi dimulai sejak tahun 2004, tercatat bahwasanya Amerika Serikat telah mulai mengurangi bantuan sebanyak \$10,5 juta yang mana jumlah tersebut termasuk pula di dalamnya sebanyak \$6,8 juta bantuan militer. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa hingga pada tahun fiskal tersebut, Departemen Luar Negeri Uzbekistan tidak bisa menjamin telah terlaksananya sistem demokrasi multi partai di Uzbekistan³⁰. Selain itu Amerika juga

²⁹US Department of State. (2003, Januari). *Country Assesment: Uzbekistan*. Diakses pada Mei 2017, dari US Department of State: <https://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/23630.htm>

³⁰Institute for Defence Studies and Analysis (IDSA). (2005, Desember 25). *IDSA COMMENT*. Diakses pada Februari 25, 2017, dari IDSA: http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/RussiaandUzbekistanSignTreatyofAllianceRelations_jbakshi_271205

mengkritik pelaksanaan politik pemerintahan di Uzbekistan yang menurut pihak Amerika Serikat tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

Dari fakta ini, meskipun secara angka terlihat bahwa Uzbekistan kehilangan sumber bantuan keuangannya di Amerika Serikat, namun di sisi lain sesungguhnya hal ini merupakan bentuk kegagalan dari Amerika Serikat dalam rangka melancarkan pengaruhnya di Uzbekistan, dalam hal ini melalui penerapan sistem pemerintahan yang demokratis. Bahwa sesuai teori neoimperialisme, Amerika Serikat disini sebagai negara kuat yang tengah melancarkan ambisinya di Uzbekistan, salah satunya membawa satu isu utama yang menjadi modus untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya di negara tersebut, khususnya isu demokratisasi. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa bahkan sejak sebelum meledaknya peristiwa Andijan Massacre yang menjadi pendorong utama kesadaran Uzbekistan, Amerika telah lebih dulu gagal pada aspek politik. Tentu saja hal tersebut semakin diperparah lagi dengan kondisi setelah Andijan Massacre, dimana pada saat itu dengan jelas pihak barat menyatakan bahwa sistem yang diterapkan di Uzbekistan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip Hak Asasi manusia dan demokratisasi.

b) Aspek keamanan Teknis-militer

Pada dasarnya, kegagalan utama yang dialami Amerika Serikat adalah pada aspek militer. Sebab sebagaimana diketahui, bahwa pada awalnya adanya kesepakatan mengenai kerja sama ini didasarkan atas cita-cita bersama

atas jaminan terkait stabilitas regional sehingga kedua belah pihak setuju atas perwujudan kerja sama yang intensif di dalam aspek keamanan dan teknis militer.

Bentuk kerja sama pada aspek ini, utamanya adalah melalui pembangunan pangkalan militer di Karshi Khanabad (K-2) Airbase. Sebagaimana juga telah sempat disinggung pada uraian bab sebelumnya, bahwa kerja sama antara Amerika Serikat dan Uzbekistan khususnya dalam aspek militer tidak berjalan mulus. Hal ini dibuktikan dengan pemutusan kerja sama oleh Uzbekistan melalui pernyataan resmi mengenai waktu 180 hari yang diberikan untuk pihak Amerika Serikat agar mengosongkan pangkalan militernya di K2 Airbase.

Selain menjadi indikator utama dari kegagalan Amerika Serikat di Uzbekistan secara keseluruhan, adanya kegagalan pada aspek keamanan dan teknis-militer ini juga menjadi faktor utama atas kegagalan Amerika Serikat di Uzbekistan secara keseluruhan, sebab pernyataan pemutusan hubungan kerja sama yang diberikan secara resmi oleh Uzbekistan pasca kejadian Andijan Massacre ini merupakan momen utama dari kandasnya hubungan keduanya, yang kemudian disusul oleh kegagalan-kegagalan Amerika Serikat pada aspek-aspek lainnya.

c) Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi, kegagalan Amerika Serikat dapat dikatakan cukup signifikan. Setelah adanya pemutusan hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Uzbekistan atau pasca Andijan Massacre, Craig Murray; seorang mantan duta besar Inggris untuk Uzbekistan yang dipecat akibat melakukan kritik atas dukungan barat untuk rezim Uzbekistan, memberikan pandangannya bahwa Uzbekistan telah berhasil menendang Amerika Serikat sebagai kekuatan terbesar di dunia akibat tindakan dari kekuatan itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa kebijakan Barat terhadap Uzbekistan sejak awal tidak dapat dipertahankan. Craig Murray juga mengatakan bahwa apa yang diharapkan, khususnya pada aspek ekonomi sungguh tidak seperti apa yang dicita-citakan. Bahwa tidak ada investasi signifikan dari barat, melainkan dari semua perusahaan milik Rusia dan China³¹.

Secara spesifik, berikut uraian kegagalan Amerika Serikat di Uzbekistan pada aspek ekonomi:

- Menurut Komite Statistik Negara Bagian Uzbekistan, volume investasi asing (termasuk pinjaman luar negeri yang dicakup oleh Jaminan Pemerintah Uzbekistan) pada Januari-September 2005 turun sebanyak

³¹The Guardian. (2005, Agustus). *Uzbekistan Kicks US Out of Military Base*. Diakses pada Mei 2017, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2005/aug/01/usa.nickpatonwalsh>

6,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2004 (Office of The United States Trade Representative, 2006).

- Neraca perdagangan barang Amerika Serikat dengan Uzbekistan beralih dari surplus perdagangan sebesar \$142 juta pada tahun 2004 menjadi defisit perdagangan sebesar \$22 juta pada tahun 2005. Ekspor barang Amerika Serikat pada tahun 2005 adalah \$74 juta, turun 68,0 % dari tahun sebelumnya. Impor Amerika Serikat dari Uzbekistan adalah \$96 juta, naik 8,7 %. Padahal Uzbekistan merupakan negara dengan 139 pasar ekspor terbesar untuk barang Amerika Serikat. Stok investasi langsung luar negeri (foreign direct investment/FDI) AS di Uzbekistan pada tahun 2004 tidak tersedia, setelah sempat mencapai \$77 juta pada tahun 2003 (Office of The United States Trade Representative, 2006).
- Pemerintah Uzbekistan membatasi impor pada tahun 2005. Pada tanggal 14 Oktober 2003, Pemerintah Uzbekistan sebenarnya telah menerima kesepakatan Pasal VIII IMF. Salah satu perubahan ini menyatakan bahwa perusahaan yang bukan milik pemerintah tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu untuk setiap kontrak impor. Namun, pemerintah terus membatasi impor barang konsumsi di Uzbekistan (Office of The United States Trade Representative, 2006).
- Beberapa perusahaan besar Amerika Serikat yang beroperasi di Uzbekistan, diantaranya Newmont Mining Corporation yang

mengoperasikan tambang emas terbuka terbesar di dunia, tepatnya di Muruntau, Gurun Qyzylqum Uzbekistan. Ini adalah usaha *major joint-venture* pertama oleh perusahaan pertambangan Barat di wilayah bekas Uni Soviet. Pada tahun 2005 pihak berwenang Uzbek menyita emas dan aset lainnya dari perusahaan tersebut dan mengajukan klaim pajak terhadapnya. Zarafshan-Newmont akhirnya mengalami kebangkrutan³².

- Investor Amerika Serikat di Coscom, Perusahaan *joint-venture* antara Uzbekistan dan Amerika Serikat yang merupakan perusahaan operator seluler terbesar ketiga di Uzbekistan pada saat itu, dipaksa keluar dari negara tersebut. Perusahaan kemudian setuju untuk menjual saham yang beredar ke TeliaSonera, grup telekomunikasi Nordik-Baltik³³.
- Melalui laporan Pertemuan Tahunan the American-Uzbekistan Chamber of Commerce pada tahun 2006 di Uzbekistan, Amerika Serikat mengungkapkan harapannya bagi kemajuan kerja sama ekonomi antara kedua negara demi tercapainya kesejahteraan Uzbekistan di masa yang akan datang. Harapan ini dikarenakan kondisi hubungan ekonomi antara kedua negara yang tidak baik terutama pada tahun 2005. Bisnis Amerika menghadapi hambatan yang tinggi di Uzbekistan, antara lain oleh bea

³²Radio Free Europe Radio Liberty. (2007, Agustus 15). *Uzbekistan: RFE/RL's Uzbek Service -- U.S. Business Ventures Provide Valuable Lessons*. Diakses pada Mei 2017, dari Radio Free Europe Radio Liberty: <https://www.rferl.org/a/1078168.html>

³³*Ibid*

masuk yang tinggi, persyaratan perizinan yang ketat, dan penerapan hukum yang selektif.

- Kondisi perdagangan antara Amerika Serikat dan Uzbekistan terus mengalami penurunan, dibanding dengan negara-negara Asia tengah lainnya. Pada tahun 2005, 29,2% dari total FDI di Kazakhstan berasal dari perusahaan Amerika sebagai investor asing nomor satu di sana. General Electric memindahkan produksi lokomotifnya ke pasar Asia ke Kazakhstan, dan FedEx membuka sebuah hub baru di ibukota komersial Almaty. Begitu pula halnya dengan Tajikistan dan Kirgistan, dimana perdagangan dengan Amerika Serikat terus meningkat. Ekspor Tajik ke Amerika Serikat adalah \$1,2 juta, angka yang relatif kecil pada tahun 2002. Pada tahun 2005, angka ini melonjak sekitar 200 kali menjadi lebih dari \$241 juta. Sedangkan ekspor barang Amerika Serikat ke Uzbekistan pada tahun 2005 turun sebesar 68% dibandingkan dengan tahun 2004 (US Department of State, 2006).

Dengan posisi aspek ekonomi sebagai salah satu aspek yang relatif paling penting selain aspek keamanan, khususnya dalam kasus perjanjian strategis yang terjalin antara Amerika Serikat dan Uzbekistan ini, sangat terlihat bahwa melalui poin-poin di atas, Amerika Serikat sebagai negara kuat yang tengah melancarkan ambisi neoimperialisnya salah satunya melalui aspek tersebut, telah mengalami kegagalan yang tidak sedikit, terutama di saat setelah adanya

peristiwa Andijan Massacre. Sangat terlihat pula melalui aspek ini seberapa besar otoritas elit Uzbekistan dalam mengambil tindakan, yang didorong oleh adanya kesadaran dari pihak internalnya terkait posisi Amerika Serikat terhadap negaranya.

d) Aspek Kemanusiaan

Kegagalan Amerika Serikat pada aspek ini terutama dapat terlihat dari usaha keras elit Uzbekistan dalam melakukan isolasi terhadap peristiwa Andijan Massacre yang dikecam keras terutama oleh pihak barat sebagai tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia. Bahwa kecaman pihak barat yang didukung oleh adanya kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia serta para jurnalis dan media untuk mendapatkan hasil atas investigasi terhadap kasus tersebut, tidak kemudian melemahkan otoritas elit Uzbekistan atas hal tersebut. Justru semakin agresif pihak barat, serta gerakan-gerakan organisasi pembela Hak Asasi Manusia dengan tekanan yang diberikan terhadap elit Uzbekistan, akhirnya berujung pada pernyataan pemutusan hubungan kerja sama oleh Uzbekistan.

Sekali lagi, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat telah mengalami kegagalan, khususnya pada aspek kemanusiaan yang juga merupakan isu utama yang diusung oleh gerakan neoimperialisme negara besar dalam rangka memperluas kekuasaan dan pengaruhnya di negara lemah, dalam hal ini tentu

saja Amerika Serikat sebagai aktor utamanya dengan Uzbekistan yang merupakan negara tidak kuat sebagai sasarannya.

e) Aspek Hukum

Kegagalan Amerika Serikat pada aspek ini juga secara signifikan sangat terlihat terutama pada saat pasca peristiwa Andijan Massacre, bahwa sebagaimana disepakati sebelumnya, melalui perjanjian yang ada kedua negara bersepakat untuk mengembangkan sistem hukum melalui peraturan perundang-undangan Uzbekistan yang dimonitor sedemikian rupa sehingga lebih sesuai dengan sistem hukum internasional meliputi perlindungan atas hak asasi manusia, demokratisasi dan liberalisasi, peningkatan aktivitas peradilan dan juga kebebasan hakim; yang mana lagi-lagi merupakan muatan dari neoimperialisme. Selain itu terakit aspek ini juga berhubungan dengan kesepakatan kedua negara dalam hal peningkatan kualitas dan aktivitas badan penegak hukum negara³⁴, yang tentu saja diharapkan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur di dalam perjanjian.

Secara signifikan, khususnya pada *pasca* peristiwa Andijan Massacre pihak elit Uzbekistan dengan otoritasnya menangani para pihak-pihak yang dinyatakan terlibat dengan caranya sendiri, yang mana utamanya menurut para gerakan pembela Hak Asasi Manusia merupakan tindakan-tindakan yang

³⁴US Department of State, *Ibid*

tidak sesuai, namun elit Uzbekistan tetap melaksanakan tindakan-tindakan tersebut.

Adapun mengenai respon Amerika Serikat terhadap pernyataan resmi yang menjadi bentuk pemutusan hubungan oleh Uzbekistan, mencerminkan adanya ambisinya yang besar terhadap Uzbekistan. Bahwa bagaimanapun, Amerika Serikat tidak ingin kehilangan andil atas Uzbekistan. Hal ini salah satunya tercermin pada pernyataan yang diberikan oleh pihak perwakilan Amerika Serikat pada saat itu, bahwa Amerika Serikat akan tetap terus memantau pelaksanaan demokratisasi serta penjaminan atas hssak asasi manusia di Uzbekistan secara berlanjut, dan juga tetap mengharapkan agar Uzbekistan menjadi partner yang baik untuk Amerika Serikat, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi keduanya untuk kembali menjalin kerja sama khusus di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian secara keseluruhan pada bab ini, dapat dipahami mengenai bagaimana di tengah perjalanan kerja sama strategis yang terjalin, kemudian muncul kesadaran elit Uzbekistan saat itu di tengah-tengah hubungan yang terjalin, antara pihaknya dengan pemerintah Amerika Serikat seiring dengan meningkatnya pengaruh negara hegemoni dunia tersebut melalui tekanan-tekanan serta kritik yang diberikan terutama pada pasca peristiwa Andijan Massacre. Sebagaimana disebutkan bahwa bentuk-bentuk aktivitas Amerika Serikat di Uzbekistan identik dengan neoimperialisme yang mana hal terebut terlihat pada hampir setiap aspek kerja sama antara Amerika Serikat dan Uzbekistan. Hal

tersebutlah yang menjadi pendorong berbagai bentuk kegagalan Amerika Serikat di Uzbekistan, khususnya dari sisi internal Uzbekistan. Kemudian Pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana reaksi Rusia terhadap kerja sama yang terjalin di antara Amerika dan Uzbekistan sejak awal, pada masa berjalan dan hingga pada saat kemudian hubungan yang terjalin akhirnya mengalami keretakan.